

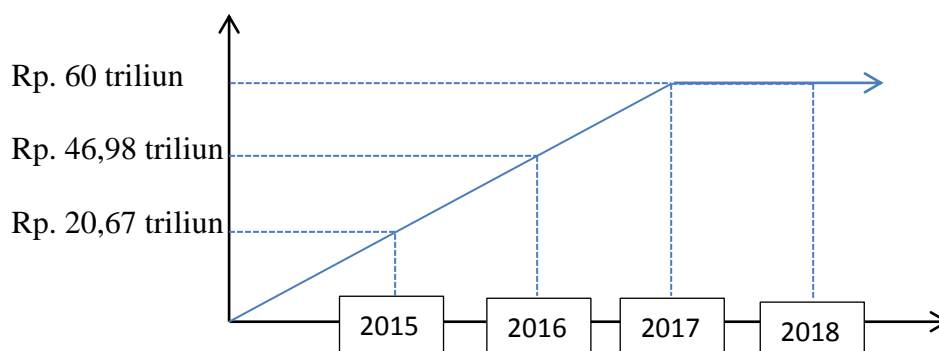
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan pondasi dari suatu negara, maju berkembangnya suatu daerah atau negara tergantung dari proses pengelolaan dalam program-program desa tersebut. Pada era pemerintahan saat ini, dana desa yang bersumber dari APBN semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut telah dibuktikan dengan permintaan presiden bahwa dana desa dinaikkan dengan tujuan pemerintah menaikkan dana desa tersebut adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur desa. Pada diagram dibawah ini menggambarkan kenaikan Dana Desa (DD) dari tahun 2015 sampai 2018.¹

Gambar 1.1
Kenaikan Dana Desa (DD)



Sumber : Tempo.co, Kenaikan DD tahun 2015-2018

¹ Tempo.co, dalam <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/437334/pemerintah-awasi-penyerapan-dana-desa-2019?>, diakses tanggal 24 Agustus 2020.

Tabel 1.1
Rata-Rata Pembagian Dana Desa (DD)

TAHUN 2015 Rp. 20,67 Triliun			TAHUN 2016 Rp. 46,98 Triliun			TAHUN 2017 Rp. 60 Triliun		
Rata-rata/ Desa (juta)	Alokasi Max (juta)	Alokasi Min (juta)	Rata-rata/ Desa (juta)	Alokasi Max (juta)	Alokasi Min (juta)	Rata-rata/ Desa (juta)	Alokasi Max (juta)	Alokasi Min (juta)
280	1.121	254	628	2.221	570	800	2.819	726

Sumber : Tempo.co, Pembagian Dana Desa

Grafik dan tabel diatas menggambarkan bahwa kenaikan dana desa dari pemerintah yang menaik setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 samapi 2018, sedangkan untuk pembagian Dana Desa (DD) pada tahun 2015 dana desa yang dianggar dari APBN sebesar Rp.20,67 triliun rata-rata per desa mendapatkan Rp.280 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp.46,98 triliun rata-rata per desa mendapatkan Rp.628 juta sedangkan tahun 2017 sebesar Rp.60 triliun rata-rata per desa mendapatkan Rp.800 juta. Karena progam dana desa dinilai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan karena itu pemerintah menaikkan anggaran untuk desa. Hal tersebut dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2018, penduduk miskin di Indonesia 9,82%. Dibandingkan periode Maret 2017, jumlah penduduk miskin per Maret 2018 turun 1,82 juta orang, persentase penduduk miskin didaerah perkotaan turun jadi 7,02% Maret 2018 dari posisi September 2017 sebesar 7,26%. Sedangkan persentase jumlah penduduk miskin di desa turun jadi 13,20% Maret 2018 dari posisi September 2017 sebesar 13,47%.² Maka dari itu dengan

² EmitenNews, dalam <https://emitennews.com/ini-alasan-pemerintah-naikkan-anggaran-desa/>, diakses tanggal 26 April 2020.

bertambahnya anggaran Dana Desa tahun depan, seharusnya penurunan angka kemiskinan di perdesaan cukup signifikan, karena anggaran yang makin besar akan membuka kesempatan kerja lebih banyak.

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kab/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Akuntansi desa disini memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pengelolaan dana desa dari pemerintah pusat agar terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik khususnya pada keuangan desa. Prinsip akuntansi dalam desa seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa bukan hanya saja bentuk kewajiban dalam pemerintah pusat, melainkan pemerintahan daerah desa.

Maka dari itu peran sistem akuntansi desa sangat membantu dalam pengelolaan, perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) pada Anggaran Pendapatan, Belanja Desa (APBDes) yang digunakan sebagai penunjang program desa atau pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan sarana prasana umum, dan non infrastruktur seperti pendidikan, budaya tradisional, pemberdayaan manusia dalam daerah dan APBDes yang bersumber dari pendapatan desa melalui bentuk usaha desa atau asset desa, retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi maupun kota/kabupaten. Hal tersebut harus sesuai dengan undang-undang

mengenai tentang Dana Desa (DD) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia agar dana desa tersebut bisa terealisasi dengan baik.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 sudah ada dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus dicatat, ayat tersebut adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ , وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ , وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ , وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا , فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ , وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ , فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى , وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا , وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ , ذَلِكَُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ بِحَاوِزَةٍ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا , وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ , وَلَا يُضَارَكَاتِبْ وَلَا شَهِيدٌ , وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ , وَاتَّقُوا اللَّهَ , وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ , وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amallah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menulis dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengidhtekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang beruntung itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mengidhtekan sendiri, maka hendaklah walinya mengidhtenya dengan benar. Dan persakskalah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengigatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak rugian, kecuali hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu

kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (*Q.S Al-Baqarah : 282*)³

Sesuai dengan Permendagri nomor 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa Jabon merupakan salah satu desa yang tertib melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi warganya seperti penyaluran bantuan miskin kepada warganya yang kurang mampu selain itu pembangunan infrastruktur jalan juga sudah berjalan dengan maksimal sehingga semua jalan yang ada di Desa Jabon sudah diperbaiki. Maka dari itu pengelolaan keuangan desa disini harus baik, jujur sesuai dengan peraturan undang-undang pemerintah.

Dalam akuntansi desa disini memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan pengelolaan serta transparansi Anggaran Pendapatan, Belanja Desa (APBDes). Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Ibarat desa itu sebuah pondasi bangunan jika bangunan itu ingin kokoh dan kuat maka pondasi tersebut harus dibangun dengan besar dan kuat, maka dari itu kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah...*, hal. 48

melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Kenny Larony dkk,⁴. Penerapan system dan prosedur akuntansi untuk penerimaan kas sudah sesuai dengan tahapan yang semestinya, dimana bendahara desa menerima pendapatan dan dicatat dalam buku bank. Namun sering juga terjadi kendala, akan tetapi bukan disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan oleh tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat.

Rento Murni Sari.⁵ Perencanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bendosari secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Bendosari dalam pelaksanaannya. Selain itu peraturan bupati nomor 17 tahun 2015 yang menjadi acuan dalam perencanaan DD sudah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bendosari telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil, serta sasaran, kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada

⁴ Kenny Larony Tangkaroro dkk, *Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*, (Jurnal riset: akuntansi going concern 12(2), 2017), hal. 8

⁵ Retno Murni Sari, *Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bendosari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung*, (Jurnal Kompilek: Vol. 7 No. 2, 2015), hal. 12

pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna.

Agar terwujudnya pengelolaan APBDes pada Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang baik dan terperinci serta dapat membawa berkembangnya pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul "**Penerapan Akuntansi Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Pemerintahan Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**". Alasan saya mengambil judul tersebut karena pada era saat ini berbicara tentang keuangan harus transparansi, jujur dan bertanggungjawab. Maka dari itu akuntansi datang sebagai pembantu untuk menyusun laporan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan APBDes pada pemerintahan Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kendala-kendala penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan APBDes pada pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah penerapan akuntansi desa sudah sesuai dengan SAP No.1 tahun 2019 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan diatas, maka ada pun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan sistem penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan APBDes pada pemerintahan Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan kendala saat penerapan sistem akuntansi desa dalam pengelolaan APBDes pada pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendiskripsikan penyajian laporan keuangan pemerintah sudah sesuai dengan SAP No.1 tahun 2019 apa belum.

D. Batasan Masalah

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara undang-undang pemerintah sudah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (permedagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan SAP nomor 1 tahun 2019 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah. pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan akuntansi desa dan SAP nomor 1 tahun 2019 tentang laporan keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa agar terwujudnya keuangan desa yang lebih efektif, efesien, terperinci dan strategis serta tepat dalam

pengambilan keputusan yang sesuai dengan visi dan misi pada pemerintahan Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Selain itu pengelolaan keuangan desa yang baik, mencerminkan bahwa kepatuhan perangkat desa dalam melaksanakan tugas yang sesuai peraturan dalam negara untuk menjadikan desa yang makmur dan sejahtera.

E. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan adanya penelitian tersebut, pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengembangan terkait dengan teori ilmu analisis laporan keuangan yang dapat diterapkan pada pemerintahan desa pada laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi terkait dengan teori akuntansi pada pemerintah desa.

- b. Bagi pemerintah desa

Hasil penelitian ini dapat memberikan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes dengan menggunakan sistem akuntansi desa agar terciptanya pengelolaan yang baik.

- c. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini berguna bagi penelitian yang lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadikan sebagai bahan rujukan membuat karya tulis ilmiah.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Akuntansi desa

Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (*Public Finance*), Khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*Butget execution*), termasuk yang di timbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.⁶ Desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik. Jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi ada saat ini, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

b. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.1 Tahun 2019

SAP nomor 1 tahun 2019 yaitu tentang penyajian laporan keuangan pemerintah, tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian

⁶ Hadi Prabowo Gimon, dkk, *Analisis sistem akuntansi pelaksanaan APBDes pada pemerintah desa Kopandakan I kecamatan Kotamobagu selatan kota Kotamobagu*, (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 2018), hal.4

laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antara periode, maupun antara entitas. Yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah sebagai untuk memenuhi kebutuhan pengguna yaitu masyarakat, lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah. Laporan keuangan ini disusun dengan menggunakan basis akrual.⁷

c. APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.⁸

2. Definisi Operasional

Secara definisi operasional yang dimaksud dengan "penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan APBDes pada pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung" adalah peran akuntansi desa pada Anggaran, Pendapatan dan Belanja, Desa (APBDes) dalam

⁷ Komite Standar Akuntansi Pemerintah, dalam <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>, diakses pada tanggal 01 April 2020, hal. 32

⁸ Retno Murni Sari, *Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bendosari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung...*, hal.7

perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan bertanggungjawab atas keuangan desa secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. APBDes merupakan sebuah perencanaan keuangan desa yang tersusun secara terperinci guna untuk membantu pelaksanaan program desa atau menghitung jumlah pendapatan desa yang diterima, pada pengelolaan keuangan desa tersebut sistem akuntansi desa sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan pada pemerintahan Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematika dari isi dari skripsi. Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga, bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut :

BAGIAN AWAL

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

BAGIAN UTAMA

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terdiri dalam sub bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di dalam bab ini didalamnya menyajikan beberapa unsur yang terdiri dari : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai keterkaitan antara pola-pola, kategori dan dimensi, posisi temuan atau teori yang dikemukakan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB AKHIR

Bagian yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.